



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3511486
FAKSIMILE (021) 3511486; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : UND-101/PK.4/2020 13 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 3

Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) bekerja sama dengan PK2ND FEB Universitas Brawijaya akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *online* Tahap 3 dengan jadwal sebagai berikut.

| No. | Kelas | Tanggal Pelaksanaan | Total Jam Pelatihan | Jumlah Peserta |
|-----|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1. | Akuntansi Keuangan Daerah | 2 s.d. 6 November 2020 9 s.d. 13 November 2020 | 26 Jam | 35 orang/ kelas |
| 2. | Perencanaan dan Penganggaran Daerah | 2 s.d. 6 November 2020 9 s.d. 13 November 2020 | 26 Jam | 35 orang/ kelas |
| 3. | Penatausahaan Perbendaharaan Daerah | 16 s.d. 20 November 2020 (2 kelas) | 26 Jam | 35 orang/ kelas |

Bimtek Keuangan Daerah akan dilaksanakan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meeting* selama 5 (lima) hari. Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan Elektronik (*e-sertifikat*).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i kiranya dapat menugaskan pejabat/pegawai yang terkait untuk mengikuti kegiatan bimtek dimaksud. Adapun persyaratan peserta dan informasi lainnya tercantum dalam lampiran undangan ini.

Calon peserta diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://bit.ly/BimtekDJPKKeuangan3>. Untuk pertanyaan lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi narahubung yang tertera dalam lampiran undangan ini.

Sebagai informasi tambahan, kami sampaikan pula bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ketentuan Umum Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *Online* Tahap 3

I. Jadwal Pelaksanaan Bimtek

| Kelas | Tanggal Pelaksanaan | Kuota Peserta | Batas Waktu Pendaftaran |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| Akuntansi Keuangan Daerah | 2 s.d. 6 November 2020 9 s.d. 13 November 2020 | 35 orang/ kelas | 26 Oktober 2020 |
| Perencanaan dan Penganggaran Daerah | 2 s.d. 6 November 2020 9 s.d. 13 November 2020 | 35 orang/ kelas | 26 Oktober 2020 |
| Penatausahaan Perbendaharaan Daerah | 16 s.d. 20 November 2020 (2 kelas) | 35 orang/ kelas | 2 November 2020 |

Jangka waktu pelaksanaan bimtek *online* selama 5 hari kerja dengan total jam pelatihan sebanyak 26 jam. Setiap hari terdiri dari 2 sesi (durasi 1 sesi yaitu 2-3 jam pelatihan).

II. Persyaratan Peserta

1. Calon peserta yang diutamakan mendaftar adalah pejabat/pegawai pemda (paling tinggi Pejabat Pengawas/ eselon IV) yang memiliki tugas terkait pengelolaan keuangan daerah
2. Berusia maksimum 50 tahun dan mendapatkan penugasan dari instansinya.
3. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa laptop/komputer, koneksi internet, dan dapat menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*.

III. Ketentuan Pendaftaran

1. Setiap Pemda dapat mengirimkan peserta sebanyak 1 (satu) orang pada tiap kelas.
2. Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan bit.ly/BimtekDJPKKeuangan3 dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Satu email hanya dapat digunakan untuk mendaftar satu kali.
 - b. Pendaftar diharuskan mengunggah/melampirkan foto atau scan formulir persetujuan atasan pada halaman pendaftaran daring.
3. Pendaftaran akan ditutup oleh Panitia apabila kuota peserta setiap kelas sudah terpenuhi.
4. Peserta yang dapat mengikuti bimtek adalah peserta yang telah lolos proses verifikasi oleh panitia dan ditetapkan dalam daftar peserta definitif oleh Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
5. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dimasukkan ke dalam Whatsapp Group bimtek masing-masing kelas.
6. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian bimtek *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7. Untuk kepentingan administrasi dan pemberian sertifikat pelatihan, seluruh peserta wajib menyampaikan Surat Tugas mengikuti pelatihan dari instansi masing-masing kepada panitia sebelum pelatihan dimulai.
8. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa prabayar.
9. Peserta bimtek tidak dikenakan biaya. Semua biaya pelatihan dibebankan pada DIPA DJPK TA 2020.
10. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
Sdri. Gita (085260569600) dan Sdr. Irfan (082134903790)

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



**KERANGKA ACUAN PEMBELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH
KELAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

| NAMA PROGRAM | |
|--|--|
| Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Akuntansi Keuangan Daerah | |
| DESKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| | Bimtek Keuangan Daerah kelas Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis dan keterampilan dasar dalam bidang akuntansi keuangan daerah dengan objektif, tepat, dan akurat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. |
| | KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| | Kredibilitas penyelenggaraan keuangan daerah salah satunya tercermin dari kualitas dan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berkualitas harus menerapkan kaidah, ketentuan, dan standar umum akuntansi pemerintah yang baku. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun dengan baik sesuai standar dapat berfungsi baik sebagai instrumen pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan daerah maupun bentuk nyata akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik. Kapasitas SDM pengelola keuangan daerah khususnya di bidang pelaporan berpengaruh penting terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan semakin kompleks, tuntutan terhadap SDM yang berkualitas tidak dapat dihindari. Untuk menjawab kebutuhan yang senantiasa ada atas SDM yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang akuntansi, DJPK, sebagai unit organisasi pengelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang salah satu tanggung jawabnya adalah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memfasilitasi penyelenggaraan bimtek keuangan daerah kelas akuntansi keuangan daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan daerah dengan baik untuk menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel. |
| | SASARAN (TARGET LEARNERS) |
| Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. | |
| MODEL PEMBELAJARAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan jarak jauh (menggunakan aplikasi <i>zoom</i>) ✓ <i>E-learning</i> DJPK | |
| STANDAR KOMPETENSI | |
| <p>Setelah mengikuti bimtek kelas akuntansi keuangan daerah, peserta diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pengertian dan fungsi akuntansi keuangan daerah 2. Memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi keuangan daerah 3. Memahami konsep dan kaidah umum jenis-jenis akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah 4. Memahami pengertian dan fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah | |

KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami pengertian dan fungsi akuntansi keuangan daerah
 - 1.1 Definisi akuntansi
 - 1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi keuangan daerah
 - 1.3 Manfaat LKPD
 - 1.4 Standar Penyusunan LKPD
2. Memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi keuangan daerah
 - 2.1 Persamaan Dasar Akuntansi
 - 2.2 Akuntansi SKPD dan PPKD (jurnal dan jurnal penyesuaian)
3. Memahami konsep dan kaidah umum jenis-jenis akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1 Akuntansi Pendapatan dan Piutang
 - 3.2 Akuntansi Belanja, Akuntansi Beban, dan Akuntansi Persediaan
 - 3.3 Akuntansi Belanja Modal dan Akuntansi Aset Tetap
 - 3.4 Akuntansi Pembiayaan, Investasi, dan Utang
 - 3.5 Akuntansi Ekuitas, Dana Cadangan, dan Transaksi Non Anggaran
 - 3.6 Akuntansi Koreksi Kesalahan, Penyesuaian dan Jurnal Penutup
4. Memahami pengertian dan fungsi laporan keuangan pemerintah daerah
 - 4.1 Jenis-jenis LKPD
 - 4.2 Keterkaitan antarLKPD

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

| No. | Kegiatan | Nama Materi | Jam Pelajaran | | | Sekuen / Urutan |
|--------------------|--------------|--|---------------|-----|-------|-----------------|
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1 | Materi pokok | Overview APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan | - | 1 | 1 | |
| | | Pengertian dan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan | - | 1 | 1 | |
| | | Macam dan Bentuk Laporan Keuangan Pemda | - | 2 | 2 | |
| | | Pencatatan dan Transaksi dengan Akun dan Persamaan Dasar Akuntansi | - | 2 | 2 | |
| | | Siklus Akuntansi SKPD | - | 3 | 3 | |
| | | Siklus Akuntansi PPKD dan Laporan Keuangan Pemda (Konsolidasi) | - | 3 | 3 | |
| | | Akuntansi Pendapatan dan Piutang | - | 2 | 2 | |
| | | Akuntansi Belanja, Akuntansi Beban, dan Akuntansi Persediaan | - | 2 | 2 | |
| | | Akuntansi Belanja Modal dan Akuntansi Aset Tetap | - | 4 | 4 | |
| | | Akuntansi Pembiayaan, Investasi, dan Utang | - | 1 | 1 | |
| | | Akuntansi Ekuitas, Dana Cadangan, dan Transaksi Non Anggaran | - | 2 | 2 | |
| | | Akuntansi Koreksi Kesalahan, Penyesuaian dan Jurnal Penutup | - | 2 | 2 | |
| | | Catatan Atas Laporan Keuangan | - | 1 | 1 | |
| 2 | Ceramah | <i>Current issue</i> dan perkembangan akuntansi keuangan daerah saat ini | - | 2 | 2 | - |
| TOTAL JP | | | 26 JP | | | |
| LAMA WAKTU UJIAN | | Pre test: 30 menit Post test: 30 menit | 60 menit | | | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | 5 hari | | | |

| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
|--|
| Bimtek kelas akuntansi keuangan daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar |
| PERSYARATAN PESERTA |
| <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN di lingkungan unit pengelola keuangan daerah (paling tinggi Pejabat Pengawas/ eselon IV). 2. Usia maksimum 50 tahun. 3. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing. <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom cloud meeting</i>. 2. Peserta memakai komputer/laptop yang terkoneksi dengan internet. |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Profesional/praktisi di bidangnya b. Memiliki pengalaman mengajar c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal 2. Kualifikasi Khusus <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i> 3. Lain-lain: Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi) |
| BENTUK EVALUASI |
| <p>Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.</p> |
| <p>Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek</p> |
| <p>Evaluasi Level 3 Evaluasi alumni peserta bimtek pasca pelatihan</p> |
| <p>Evaluasi Level 4 -</p> |
| FASILITAS |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pembelajaran daring melalui zoom meeting. 2. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan. 3. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan. 4. Fasilitator/administrator kegiatan. 5. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa prabayar. 6. Sertifikat bagi peserta bimtek yang dinyatakan lulus. |

**KERANGKA ACUAN PEMBELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH
KELAS PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**

| NAMA PROGRAM | |
|--|--|
| Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah | |
| DESKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| | Bimtek keuda kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis dan keterampilan dasar dalam bidang penatausahaan perbendaharaan daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik penganggaran yang berlaku. |
| | KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| | Penatausahaan perbendaharaan daerah memegang peranan penting dalam akuntabilitas pelaksanaan anggaran daerah karena menyangkut ketertiban pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN Pemda yang memiliki tugas maupun sebagai verifikator maupun bendahara, DJPK bekerja sama dengan Universitas Indonesia menyelenggarakan bimtek keuangan daerah kelas penatausahaan perbendaharaan daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai bendahara dengan baik untuk menjadi bagian penting dalam mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan kredibel. |
| | SASARAN (TARGET LEARNERS) |
| Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam bidang penatausahaan perbendaharaan daerah. | |
| MODEL PEMBELAJARAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan jarak jauh (menggunakan aplikasi <i>zoom</i>) ✓ <i>E-learning</i> DJPK | |
| STANDAR KOMPETENSI | |
| <p>Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penatausahaan perbendaharaan daerah, peserta diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami <i>Overview</i> APBD 2. Memahami Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Memahami Tahap Pelaksanaan APBD 4. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan 5. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran 6. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ BUD 7. Memahami SPIP terkait penatausahaan 8. Memahami Pajak Bendahara | |
| KOMPETENSI DASAR | |
| <p>Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami <i>Overview</i> APBD <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Siklus penyusunan APBD 1.2 Gambaran Umum Pendapatan Daerah 1.3 Gambaran Umum Belanja dan Pembiayaan Daerah 2. Memahami Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah (hirarki, struktur, tusi) <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Daerah 2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab Sekretaris Daerah 2.3 Kewenangan dan Tanggung Jawab PPKD 2.4 Kewenangan dan Tanggung Jawab BUD | |

- 2.5 Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa BUD
- 2.6 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- 2.7 Kewenangan dan Tanggung Jawab PPK SKPD
- 2.8 Kewenangan dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan / Pengeluaran
- 2.9 Kewenangan dan Tanggung Jawab KPA
- 2.10 Kewenangan dan Tanggung Jawab PPK UKPD
- 2.11 Kewenangan dan Tanggung Jawab Bendahara penerimaan pembantu/pengeluaran pembantu
- 2.12 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 3. Memahami Tahap pelaksanaan APBD
 - 3.1 Penyusunan DPA
 - 3.2 Anggaran Kas
 - 3.3 Surat penyediaan dana (belanja)
- 4. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan
 - 4.1 SKPD
 - 4.2 PPKD
- 5. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran
 - 5.1 Metode Pembayaran (Tunai dan nontunai)
 - 5.2 SKPD
 - 5.3 PPKD
- 6. Memahami Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian LPJ BUD
 - 6.1 Laporan Posisi Kas Harian
 - 6.2 Rekonsiliasi Kas Bank
 - 6.3 Manajemen kas dan setara kas
 - 6.4 Laporan interim dan tahunan
- 7. Memahami SPIP terkait penatausahaan
 - 7.1 Definisi dan tujuan SPIP
 - 7.2 Monitoring dan evaluasi
 - 7.3 Unsur-unsur SPIP
- 8. Memahami Pajak Bendahara
 - 8.1 Jenis pajak dan retribusi
 - 8.2 Pelaporan perpajakan dan retribusi

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

| No. | Kegiatan | Nama Materi | Jam Pelajaran | | | Sekuen / Urutan |
|--------------------|--------------|--|---------------|-----|-------|-----------------|
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1 | Materi pokok | 1. <i>Overview</i> APBD | - | 1 | 1 | |
| | | 2. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah | - | 1 | 1 | |
| | | 3. Tahap pelaksanaan APBD | - | 2 | 2 | |
| | | 4. Penatausahaan Bendahara Penerimaan | - | 2 | 2 | |
| | | 5. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran | - | 6 | 6 | |
| | | 6. Penatausahaan BUD | - | 4 | 4 | |
| | | 7. SPIP terkait penatausahaan | - | 6 | 6 | |
| | | 8. Pajak Bendahara | - | 2 | 2 | |
| 2 | Ceramah | <i>Current issue</i> perencanaan dan penganggaran daerah | - | 2 | 2 | |
| TOTAL JP | | | 26 | | | |
| LAMA WAKTU UJIAN | | Pre test : 30 menit Post test: 30 menit | 60 menit | | | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | 5 hari | | | |

| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
|--|
| Bimtek kelas penatausahaan perbendaharaan daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar |
| PERSYARATAN PESERTA |
| <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Pemda di lingkungan unit pengelola keuangan daerah (paling tinggi Pejabat Pengawas/ eselon IV). 2. Usia maksimum 50 tahun. 3. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing. <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom cloud meeting</i> 2. Peserta memakai komputer/laptop yang terkoneksi dengan internet |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimum S-1 b. Memiliki pengalaman mengajar c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal 2. Kualifikasi Khusus <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i> |
| BENTUK EVALUASI |
| Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website <i>e-learning</i> DJPK. |
| Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek |
| Evaluasi Level 3 Evaluasi alumni peserta bimtek pasca pelatihan |
| Evaluasi Level 4 - |
| FASILITAS |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pembelajaran daring melalui <i>zoom meeting</i>. 2. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan. 3. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan. 4. Fasilitator/administrator kegiatan. 5. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa prabayar. 6. Sertifikat bagi peserta bimtek yang dinyatakan lulus. |

**KERANGKA ACUAN PEMBELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH
KELAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**

| | |
|--|---|
| NAMA PROGRAM | |
| Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah | |
| DESKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| | Bimtek keuda kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis dan keterampilan dasar dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan kaidah umum dan praktik penganggaran yang berlaku. |
| | KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| | Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Arah pembangunan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas harus menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara integratif dan tidak semata difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan publik di daerah atau peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, tapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN Pemda di bidang perencanaan dan penganggaran, DJPK bekerja sama dengan Universitas Indonesia menyelenggarakan bimtek keuangan daerah jalur daring kelas perencanaan dan penganggaran daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan daerah maupun penyusun anggaran dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel. |
| | SASARAN (TARGET LEARNERS) |
| Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam perencanaan dan/atau penganggaran. | |
| MODEL PEMBELAJARAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan jarak jauh (menggunakan aplikasi <i>zoom</i>) ✓ <i>E-learning</i> DJPK | |
| STANDAR KOMPETENSI | |
| <p>Setelah mengikuti bimtek keuda kelas perencanaan dan penganggaran daerah, peserta diharapkan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Memahami <i>Overview</i> APBD 3. Memahami Penganggaran Daerah 4. Memahami Praktik Penyusunan Anggaran 5. Mengetahui <i>E-Government</i> | |
| KOMPETENSI DASAR | |
| <p>Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Perencanaan Pembangunan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengertian dan Konsep Perencanaan Pembangunan 1.2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1.4. Penyusunan Renstra dan Renja OPD 1.5. KUA dan PPAS |
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Memahami <i>Overview</i> APBD <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Struktur APBD 2.2 Gambaran Umum Pendapatan Daerah 2.3 Gambaran Umum Belanja dan Pembiayaan Daerah 2.4 Sistem perencanaan / RPJMD |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Memahami Penganggaran Daerah <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Serta Siklus Anggaran 3.2 Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) 3.3 Anggaran Berbasis Kinerja 3.4 <i>Value for Money</i> 3.5 Standar Pelayanan Minimal 3.6 Analisis Standar Belanja 3.7 Standar Satuan harga |
| <ul style="list-style-type: none"> 4 Memahami Praktik Penyusunan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Teori dan Latihan) (Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan, investasi (BLUD), dana bergulir 4.2 Simulasi Penyusunan Analisis Standar Belanja 4.3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Teori dan Latihan) |
| <ul style="list-style-type: none"> 5 Memahami E-Government <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup <i>E-Government</i> 5.2 <i>E-Planning, E-Budgeting, dan E-Controlling</i> |

LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

| No. | Kegiatan | Nama Materi | Jam Pelajaran | | | Sekuen / Urutan |
|--------------------|------------------------|--|---------------|-----|-------|-----------------|
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1 | Materi pokok | Pre-test | | | | |
| | | 1. Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 6 | 6 | |
| | | 2. Overview APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan | - | 2 | 2 | |
| | | 3. Penganggaran Daerah | - | 6 | 6 | |
| | | 4. Praktik Penyusunan Anggaran | - | 6 | 6 | |
| | | 5. E-Government | | 4 | 4 | |
| 2 | Materi penunjang | - | - | - | | |
| 3 | Ceramah | <i>Current issue</i> perencanaan dan penganggaran daerah | - | 2 | 2 | |
| 4 | PKL/ studi lapangan | - | - | - | | |
| 5 | Outbound | - | - | - | | |
| 6 | MFD | - | - | - | | |
| 7 | Pengarahan program | - | - | - | | |
| 8 | <i>Action Learning</i> | - | - | - | | |
| TOTAL JP | | | 26 | | | |
| LAMA WAKTU UJIAN | | Pre test : 30 menit Post test: 30 menit | 60 menit | | | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | 5 hari | | | |

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Bimtek kelas perencanaan dan penganggaran daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar

| PERSYARATAN PESERTA |
|--|
| <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN Pemda di lingkungan unit pengelola keuangan daerah (paling tinggi Pejabat Pengawas/ eselon IV). 2. Usia maksimum 50 tahun. 3. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing. <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom cloud meeting</i>. 2. Peserta memakai komputer/laptop yang terkoneksi dengan internet. |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimum S-1 b. Memiliki pengalaman mengajar c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal 2. Kualifikasi Khusus <ol style="list-style-type: none"> a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i> |
| BENTUK EVALUASI |
| <p>Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website <i>e-learning</i> DJPK.</p> |
| <p>Evaluasi Level 2 Peserta menjalani <i>pre test</i> dan <i>post test</i> untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek</p> |
| <p>Evaluasi Level 3 Evaluasi alumni peserta bimtek pasca pelatihan</p> |
| <p>Evaluasi Level 4 -</p> |
| FASILITAS |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pembelajaran daring melalui zoom meeting. 2. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan. 3. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan. 4. Fasilitator/administrator kegiatan. 5. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa Prabayar. 6. Sertifikat bagi peserta bimtek yang dinyatakan lulus. |

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Formulir Persetujuan Atasan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor Whatsapp :

Menyatakan setuju dan berkomitmen mendukung keikutsertaan pejabat/pegawai di bawah ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Keuangan Daerah secara Daring (*Online*)

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Kab/Kota :
Nomor Whatsapp :
Kelas Bimtek :
Tanggal Bimtek :

....., Oktober 2020
Pejabat yang menugaskan,
.....

.....

Catatan:

1. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan bit.ly/BimtekDJPKKeuangan3
2. Peserta tidak dikenakan biaya.
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
Sdri. Gita (085260569600) dan Sdr. Irfan (082134903790)

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

